

**Faktor-Faktor Keberhasilan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 – 2012**

*Nurpadli*

*Raja Muhammad Amin*

*Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau*

**Cp: 0852 7158 7555**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to look at the factors that influence the success of village government in conducting physical development in the village of Tanjung Pauh, District Singingi Downstream, Kuantan Singingi. Based on these observations, the authors look at the construction carried out in the village of Tanjung Pauh can be said to be very good or successful. Development is done in the village are not always wait for funding or assistance from the government on it. From the success of the village of Tanjung Pauh in doing construction, the authors noticed some potential still to be managed well, so that will support rural incomes and overall development that can be achieved, that is, the wealth of the village as land that has not been exploited and managed by the village together society, and the need to increase the potential of human resources. In order for the potential of human resources can be empowered and will encourage accelerated development. The purpose of this study was to determine the factors that influence the success of rural development in the village of Tanjung Pauh, District Singingi Downstream, Kuantan Singingi. The research method used in this study is qualitative research by conducting interviews and observations in the field where research, allowing researchers to understand the phenomena that occur in the field where the research was conducted. From the research results in the village governance effort in the development of the village in the village of Tanjung Pauh there are several factors, namely, the participation or the participation of rural communities, the presence of other sources of revenue villages, the rural household, institutional functioning and involvement of the village. And the author recommends to the Office of Tanjung Pauh to constantly improve the ability of government officials in carrying out regional autonomy oriented.*

*Keywords: Tanjung Pauh, qualitative research, interviews and observations*

**PENDAHULUAN**

Dengan berlangsungnya waktu sebagai dampak positif dari reformasi total yang terjadi pada tahun 1998 telah merubah sistem pemerintahan di Indonesia yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik, dengan memberi keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Dampak positif dari reformasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang ini dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanaan Undang-Undang ini diharapkan akan membawa perubahan pada kehidupan pemerintah daerah yang dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah. Beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh daerah adalah: *Pertama*, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang harus memiliki keterampilan baik secara teknik maupun wawasan intelektual yang luas dan diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi. Kaho (1988 : 60) mengemukakan bahwa mekanisme sistem pemerintahan, baik Daerah maupun Pusat, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki, apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkannya baik pula. Tanpa manusia pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik. *Kedua*, kemampuan sumber-sumber keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena selama ini sektor-sektor pembiayaan pembangunan daerah pada umumnya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diusahakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, sedangkan subsidi dari pemerintah pusat hanya bersifat sebagai pendukung. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah otonom harus mampu menggali berbagai potensi sumber daya daerah sehingga dapat menopang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang bersangkutan. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan, kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. *Keempat*, organisasi dan manajemen. Faktor ini tidak kalah pentingnya dengan ketiga faktor tersebut diatas karena penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh berjalannya fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Dengan memberikan desentralisasi berarti mengukur pula pelaksanaan otonomi, dan menentukan tolak ukur pelaksanaan desentralisasi (otonomi) tentunya tidak terlepas dari pemberian otonomi itu sendiri yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Sujamto, 1988:18).

Upaya menata ulang konsep pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disejalankan pula dengan penataan Pemerintahan desa. Sehubungan dengan itu maka melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan kondisi kemandirian Desa yang sinergis dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

## **TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian dan masalah yang akan diteliti maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong dikutip dari Bogdan dan Taylor (2006: 4) bahwasanya Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2006 : 4).

Kirk dan Miller dalam Moleong (2006 : 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis melakukan penelitian di desa ini adalah melihat sebuah desa yang terletak jauh dari Ibukota Kabupaten, namun mampu melakukan pembangunan desa dengan baik.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

a. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1). Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dari informan penting di daerah penelitian.

## 2). Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari sumber kedua.

### b. Sumber Data

#### 1). Informan

Yaitu Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPM, dan masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah desa.

**Tabel I.3**  
**Informan dalam Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Perangkat Desa	5 orang
3.	Badan Permusyawaratan Desa	2 orang
4.	Masyarakat	2 orang

*Sumber : Desa Tanjung Pauh*

## 2). Dokumen

Mengumpulkan segala macam dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada di kantor Kepala Desa.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan maka teknik yang digunakan adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling efisien, karena wawancara merupakan metode yang sederhana akan tetapi dapat mengambil manfaat yang sangat besar. Wawancara penelitian dilakukan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat/tokoh adat yang mengetahui dan memahami permasalahan untuk mendukung sumber data yang dibutuhkan.

### b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dari berbagai dokumen terutama dari kantor kepala desa yang berhubungan dengan penelitian.

### c. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan, dengan jalan melihat secara langsung fenomena-fenomena yang relevan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dari hasil wawancara akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, caranya adalah apabila semua data telah terkumpul lalu diklarifikasikan atau digambarkan dengan kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Data yang terkumpul dari lapangan dan dari analisis yang dilakukan akan menggambarkan bagaimana keberhasilan pemerintah desa tempat penelitian dilakukan dalam melakukan pembangunan desa.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Adanya keikutsertaan masyarakat/partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan taraf hidup mereka yang tergantung pada swakarsa dan swakarya

Pembangunan masyarakat ditujukan untuk masyarakat, tetapi sebagai metode, pembangunan masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap individu untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat, karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan tersendiri yang disebut *Community Power*, misalnya; seperti kerukunan, keakraban, solidaritas, dan kebersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pauh, tanggal 3 Desember 2012 terkait dengan penilaian sebagian adat yang tidak ditaati oleh masyarakat, Kepala Desa mengatakan :

”Masyarakat Desa Tanjung Pauh merupakan masyarakat yang homogen, namun sejauh ini masih ada sebagian besar dari masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang dimiliki sejak dulu dan masih memelihara adat istiadat tersebut sampai saat ini, adat istiadat dipangku oleh ninik mamak sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat. Namun karena kemajuan teknologi terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat yang kadang-kadang pemangku adat tidak leluasa bertindak untuk tegaknya nilai-nilai adat secara utuh.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan, tanggal 3 Desember 2012 terkait dengan penilaian sebagian masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan sesuai adat yang ditaati oleh masyarakat, Kepala Urusan Pembangunan mengatakan :

”Masyarakat Desa Tanjung Pauh turut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, desa masih memelihara adat istiadat sampai saat ini. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Tanjung Pauh, pihak perangkat desa melibatkan ninik mamak selaku pemangku adat untuk merumuskan dan memusyawarahkan penyelenggaraan pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan

nantinya tidak bertentangan dengan adat dan berjalan dengan semestinya, ini menunjukkan bahwa ninik mamak turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.”

Dari hasil penelitian dan wawancara serta hasil observasi dapat disimpulkan bahwa di Desa Tanjung Pauh terdapat nilai-nilai adat yang masih mengikat dan ditaati oleh masyarakat.

### **c. Sumber-sumber pendapatan desa**

Setiap desa memiliki kekayaan yang berasal dari potensi yang dimiliki dari masing-masing desa bersangkutan. Potensi yang dimiliki desa mencakup ; Sumber penghasilan desa yakni tanah, teknologi pertanian dan sebagainya, tata hidup dan sistem sosial masyarakat desa yakni isolasi fisik dan kultur, desa-desa otonom diberi wewenang untuk memiliki sumber-sumber yang berasal dari kekayaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tanjung Pauh, tanggal 3 Desember 2012 diperoleh informasi bahwa :

”Desa Tanjung Pauh memiliki kekayaan desa berupa tanah, lembaga desa, kekayaan desa ini merupakan milik masyarakat dari Desa Tanjung Pauh yang rata-rata masih berpendidikan SD, walaupun masyarakat rata-rata masih berpendidikan SD namun dengan kekayaan desa yang ada diharapkan mampu lebih meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi.”

Namun dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa perselisihan berkenaan sumber pendapatan desa pada Desa Tanjung Pauh, karena kekayaan desa yang ada masih menimbulkan perselisihan antar masyarakat seperti terdapat perselisihan masalah tanah antar masyarakat sehingga melibatkan ninik mamak.

Dari hasil analisis data dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Desa Tanjung Pauh terdapat kekayaan desa dimana kekayaan desa tersebut dapat menunjang APBDes Tanjung Pauh.

Adanya pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari pajak dan retribusi memungkinkan suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat dipergunakan untuk proses dan kelancaran pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah merupakan dana keuangan yang diperoleh daerah untuk membiayai berbagai pembangunan di wilayahnya.

Adapun sumber-sumber pendapatan desa yang didapat oleh Pemerintah Desa Tanjung Pauh adalah:

1. Sumber dari pemerintah ; bantuan subsidi atau sumbangan (dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi)

2. Sumber dari masyarakat ; gotong-royong, swadaya, iuran yang diberikan masyarakat.
3. Sumber dari desa ; sarana dan prasarana yang bisa menghasilkan retribusi seperti retribusi pemanfaatan hasil hutan, retribusi hasil hutan.
4. Sumber dari pihak ketiga ; adanya sumbangan atau bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Desa Tanjung Pauh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Pauh, tanggal 3 Desember 2012 diperoleh informasi bahwa:

”Sumber-Sumber Pendapatan Desa yang ada di Desa Tanjung Pauh diperoleh dari dana bantuan pemerintah dan dari pendapatan-pendapatan asli desa yang dipungut dari pajak maupun retribusi yang dikenakan bagi masyarakat.”

Dari hasil analisis data dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berada pada kategori cukup baik. dimana dapat diketahui bahwa pada Desa Tanjung Pauh terdapat sumber-sumber pendapatan desa yang memerlukan pengelolaan maksimal dari pihak perangkat desa.

### **c. Urusan Rumah Tangga Desa**

Pembangunan di setiap wilayah pedesaan merupakan perpaduan kegiatan pembangunan sektoral dan regional dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Oleh karenanya perlu selalu diusahakan peningkatan dan pemantapan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang berlangsung di setiap wilayah.

Seorang pemimpin desa hendaknya mampu untuk meningkatkan pendapatan asli Desa itu sendiri, untuk itu desa Tanjung Pauh sangat membutuhkan aturan-aturan yang di terbitkan oleh BPD bersama kepala desa di Desa Tanjung Pauh. Peraturan yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan asli desa belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari jumlah peraturan desa yang di terbitkan oleh desa Tanjung pauh dari priode tahun 2011 sampai tahun 2012 terdapat 6 buah peraturan desa yang bisa di terbitkan oleh Desa Tanjung Pauh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota BPD Desa Tanjung Pauh, tanggal 4 Desember 2012 diperoleh informasi bahwa:

”Dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, Kepala Desa beserta aparat desa saling berkoordinasi untuk sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab sehingga penyelenggaraan desa di Desa Tanjung Pauh dapat berjalan dengan baik, selain itu perangkat desa bekerja sama dengan pihak BPD untuk sama-sama menjalankan

peraturan desa yang telah diterbitkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Namun sejauh ini pihak aparat Desa Tanjung Pauh memerlukan pemaksimalan dalam mengurus rumah tangganya terutama dalam penerbitan APBDes yang memuat pengaturan rumah tangga desa, sejauh ini jumlah peraturan desa yang diterbitkan di Desa Tanjung Pauh masih sedikit.

Dari hasil analisis data dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa urusan rumah tangga desa berada pada kategori cukup baik. Dan dari hasil observasi yang dilakukan diketahui dalam melakukan urusan rumah tangga desa pihak aparat Desa Tanjung Pauh melakukan penerbitan peraturan desa.

#### **d. Fungsi kelembagaan dan keterlibatan perangkat desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan seorang Kepala Desa yang memimpin wilayah desa dan perangkatnya. Pemimpin merupakan hasil pilihan dari masyarakatnya dan tentunya pilihan tersebut berdasarkan hasil pemilihan desa yang dilaksanakan dengan melakukan pemungutan suara, suara yang terbanyak merupakan pimpinan atas pilihan masyarakat, karena pentingnya pemimpin, maka desa melakukan pemilihan Kepala Desa dan aparatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Tanjung Pauh, tanggal 4 Desember 2012 diperoleh informasi bahwa:

”Dalam enam tahun sekali desa Tanjung Pauh menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, pemilihan perangkat desa dipilih langsung oleh masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.”

Namun dalam penyelenggaraan pemilihan perangkat desa, pemerintahan Desa dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa, karena masih terdapat perangkat desa yang dipilih belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan misalnya pendidikan yang dimiliki oleh calon perangkat desa.

Dari hasil analisis data dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa Dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa berada pada kategori cukup baik. Dan dari hasil observasi yang dilakukan diketahui pemerintahan Desa dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota BPD Desa Tanjung Pauh, tanggal 4 Desember 2012 diperoleh informasi bahwa:

”Dalam lingkup pemerintahan desa perlu adanya kebijakan dari aparat desa untuk mengeluarkan peraturan-peraturan desa, peraturan desa ini berguna untuk menjaga ketentraman dan ketertiban desa agar lebih terarah. Peraturan desa merupakan salah satu landasan hukum yang ada di desa untuk dijalankan dan dipatuhi bukan hanya oleh aparat desa tapi juga seluruh masyarakat desa.”

Dari hasil analisis data dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi dengan cukup baik. Dan dari hasil observasi yang dilakukan diketahui Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Fungsi berada pada kategori cukup baik dalam pembentukan peraturan desa.

Selain dari empat poin di atas, penulis melihat ada beberapa faktor yang mendukung pemerintah desa Tanjung Pauh dalam melakukan pembangunan, baik itu dukungan dari dalam maupun dukungan dari luar. Sehingga dengan adanya dukungan tersebut maka desa Tanjung Pauh mampu melakukan pembangunan dengan baik. Dukungan yang dimaksud ialah:

1. Adanya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan masukan-masukan bagi peningkatan perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pihak pemerintah desa dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pembangunan yang ditetapkan. Terutama kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya.
3. Adanya sejumlah dana APBD dan APBDes yang mendukung pembangunan sehingga dirumuskan beberapa perencanaan pembangunan sesuai dengan jumlah anggaran dana yang telah ditetapkan dan dimiliki.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013, salah seorang staf di kantor desa Tanjung Pauh mengatakan :

“Setiap akan melakukan pembangunan, masyarakat diundang untuk bisa terlibat langsung dalam merumuskannya. Namun perekonomian masyarakat yang rata-rata petani menjadi kendala, sehingga untuk bisa berpartisipasi langsung secara aktif tidak memungkinkan. Karena mereka (masyarakat) akan lebih memilih ke kebun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari pada rapat mengenai pembangunan desa.”

Dalam melakukan pembangunan, pemerintahan desa harus bisa memahami apa-apa yang menjadi kebutuhan dan diperlukan oleh masyarakat. Dan dalam melakukan pembangunan di desa, pemerintah desa harus mampu melibatkan masyarakat secara aktif, agar pembangunan yang dilakukan tidak terjadi timpang-tindih. Perlunya pengelolaan keuangan yang baik menjadi sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan bisa terarah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penyelenggaraan otonomi desa di Desa Tanjung Pauh terdapat beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjung Pauh antara lain ;

- terdapat keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat desa, terdapatnya sumber-sumber pendapatan desa, adanya urusan rumah tangga desa, fungsi kelembagaan dan keterlibatan perangkat desa.
2. Adapun faktor penghambat penyelenggaraan otonomi desa di Desa Tanjung Pauh antara lain : Kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih belum dikelola dengan maksimal, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, kemampuan aparatur Desa Tanjung Pauh baik berdasarkan pengalaman, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki aparatur, Kemampuan demografi dan ekonomi, kemampuan dalam menyelenggarakan organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien.

## **B. Saran-Saran**

1. Penulis menyarankan kepada pihak Kantor Desa Tanjung Pauh agar senantiasa meningkatkan kemampuan aparatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah.
2. Hendaknya pihak aparat Desa Tanjung Pauh melakukan peningkatan-peningkatan terhadap potensi yang ada diwilayahnya agar Desa Tanjung Pauh memiliki pemasukan dana yang lebih besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi. 2004. *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menumbuhkan Demokrasi Desa*. Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kaho, J. R. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Kybernology*, Penerbit Rineka Cipta, jakarta
- Riyadi, dan Bratakusumah, D. S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.